

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.P. Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1991)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Gunung Agung, 1996)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Bakti, 2004)
- Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Frans Magnis Suseno, *Etika dasar : masalah-masalah pokok filsafat moral*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1993)
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (terjemahan Tristam Moeliono), (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003)
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2009)
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Mukri Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY Pustaka Pelajar, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
- Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum, edisi revisi*, Jakarta, kencana, 2014
- Rusmadi Murrad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006)
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Urip Santoso, cetakan kedua, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet, XXIV, (terjemahan Oetarid sadino), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

## Jurnal

Isdiyana Kusuma Ayu, 2019, *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Mimbar Hukum* Vol.31, 2019, [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=mgHq2-oAAAAJ&citation\\_for\\_view=mgHq2-oAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=mgHq2-oAAAAJ&citation_for_view=mgHq2-oAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Sekilas ATR/BPN”, 2020, DOI: <https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas-ATR-BPN>,.

Novi Sri Wahyuni “Tinjauan Yuridis Terhadap Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Yang Bertendensi Positif Dalam Pendaftaran Tanah” , 2007, DOI: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20525>

Wily yana dkk, *Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* Vol. 2, 2020. DOI: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/2796>.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

## **Internet**

Andylala Waluyo, “Jokowi Pastikan Program Sertipikat Tanah Adalah Nyata Untuk Rakyat”, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-pastikan-program-sertipikat-adalah-nyata-untuk-rakyat/4320482.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

Cantika Adinda Putri “Target Pemberian Sertipikat Tanah Jokowi di 2020 Meleset” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210105135003-4-213608/target->

pemberian-sertipikat-tanah-jokowi-di-2020-meleset, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam mengimplementasikan

Nawacita”, diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kebijakan-kementerian-atrbpn-dalam-mengimplementasikan-nawacita-6032,4>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

Mimbar Publik “PTSL Diterbitkan Berdasarkan Fotocopy Surat Tebas, LMP Bintang Bakal Buat Aduan Ke Kementerian ATR/BPN”.

<https://www.mimbarpublik.com/2023/02/25/ptsl-diterbitkan-berdasarkan-fotocopy-surat-tebas-lmp-bintang-bakal-buat-aduan-ke-kementerian-atrbpn/> diakses pada Tanggal 08 Maret 2023.

Saifulanam “Pendekatan Perundang-Undang Dalam Penelitian Hukum”.

<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada Tanggal 08 Mei 2023

Tira Santia “Kementrian ATR/BPN Target 100 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi di

2022” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5126510/kementerian-atrbpn-target-100-juta-bidang-tanah-tersertifikasi-di-2022>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti “Arti Cacat Hukum”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>. Diakses pada tanggal 13 April 2020.

Trustmedia “Di Bintang 36 PTSL Terancam Dibatalkan, Terkuak Dasar Penerbitan Sporadik Dan Surat PTSL Berdasarkan Suet Potocopy Surat Tebas”.

<https://trustmedia.id/di-bintang-36-surat-ptsl-terancam-dibatalkan-terkuak-dasar-penerbitan-sporadik-dan-surat-ptsl-berdasarkan-surat-potocopy-surat-tebas/> diakses pada tanggal 29 Maret 2023

Tunggul “Gemapatas, Kepri Targetkan Pemasangan 7 Ribu Patok Batas Bidang

Lahan Pada 2023”. <https://kepri.batampos.co.id/gemapatas-kepri-targetkan-pemasangan-7-ribu-patok-batas-bidang-lahan-pada-2023/>,

diakses pada Tanggal 09 Maret 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian>

<https://kbbi.web.id/cacat>.

